



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
KECAMATAN WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KECAMATAN WONOBOYO
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah kantor Kecamatan Wonobojo Tahun 2019 . LKjIP Perangkat Daerah Kecamatan Wonobojo Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah Kecamatan Wonobojo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan wonobojo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Perangkat Daerah Kecamatan wonobojo .

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Perangkat Daerah Kecamatan Wonobojo, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Januari 2020

CAMAT WONOBOYO

BUDI SUPRIYONO.SH.MM

Pembina Tingkat I

NIP.196306051986091002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Organisasi	8
Tugas pokok dan fungsi	9
Permasalahan Utama	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis	11
Indikator Kinerja Utama	12
Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
Komitmen Pimpinan	17
Pengukuran Kinerja	17
Pelaksanaan Agenda Reformasi	18
Capaian kinerja organisasi	20
Capaian kinerja sasaran	22
Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	65

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

LAMPIRAN II

Laporan pengukuran kinerja s.d triwulan IV tahun 2019

LAMPIRAN III

Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (Foto gambar sertifikat/ piala/ Penyerahan dll)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 2.1	24
Tabel 3.1	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4
Gambar 2.1	24
Gambar 3.1	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Kecamatan Wonoboyo yang dipimpin camat merupakan bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Temanggung wajib untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kecamatan Wonoboyo secara komprehensif dimaksud dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang bersih, transparan, responsive, dan akuntabel menuju Clean Governance dan Good Government sekaligus sebagai bagian dari perencanaan penganggaran pelaksanaan kegiatan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang diakhiri dengan pelaporan

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

1) Gambaran Umum Kondisi Kecamatan Wonoboyo

1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

- Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan Wonoboyo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung yang memiliki wilayah seluas 2629,49 Ha. Secara administratif kecamatan Wonoboyo terdiri dari 13 desa 49 dusun 43 RW 148 RT dengan Pusat

Pemerintahan berada di Desa Wonobojo. Secara rinci pembagian administratif dan luas wilayah di tiap desa dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Pembagian administratif dan luas wilayah

No	Desa	Dusun	Jml RT	Jml RW	Jml KK	Jml Penduduk	Luas Wilayah
1	Wonobojo	1. Wonobojo 2. Joho 3. Kleseman	25	3	613	2344	
2	Pateken	1. Pateken 2. Pospo 3. Bongso 4. Seneng	14	4	648	2331	
4	Kebonsari	1. Kebonsari 2. Bantengan 3. Pugeran 4. Bendan 5. Ngeroto 6. Dengok 7. Wonorejo	18	5	745	3.157	258,265 ha
5	Semen	1. Semen 2. Jetak 3. Margosono 4. Kudon 5. Jomblang	12	5	521	1.784	111,632 ha
6	Tening	1. Tening 2. Margosari 3. Wanangsri 4. Semampir 5. Kemesu	17	6	435	1.872	367,315 ha

7	Purwosari	1. Gelangan Jurang 2. Gelangan Gunung 3. Senet 4. Sembir 5. Karang Anyar 6. Batur	27	6	752	3.176	329,325 ha
8	Wonocoyo	1. Wonocoyo 2. Sirno 3. Gopakan 4. Mujil	10	4	387	1.711	202,4 ha
9	Pesantren	1. Tegalsari 2. Pesantren 3. Jurang	10	3	304	1.346	152,450 ha
10	Rejosari	1. Josari 2. Simbang Ngisor 3. Simbang Tengah 4. Simbang Duwur 5. Nglarangan 6. Pomahan 7. Ngeroto	20	7	735	3.131	378,112 ha
11	Taawang Sari	1. Mejing 2. Tawang Sari	11	2	226	906	383,52 ha
12	Cemoro	1. Cemoro Barat 2. Cemoro Timur 3. Tempel 4. Pongangan 5. Dadapan	9	5	480	2.467	487,549
13	Wates	1. Wates 2. Ngejukan	8	2	315	1099	202,061 ha

Kecamatan Wonoboyo berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di wilayah Kabupaten Temanggung. Batas – batas wilayah tersebut pada:

Sebelah Utara : Kecamatan Candiroto/Bejen

Sebelah Timur : Kecamatan Candirotro
Sebelah Selatan : Kecamatan Candirotro
Sebelah Barat : Kecamatan Tretep

- **Letak Geografis**

Wilayah Kecamatan Wonobojo terletak pada ketinggian tanah rata – rata 800 mdpl, dengan suhu maksimum 29⁰C dan suhu minimum 18⁰C. Rata rata jumlah hari hujan 64 hari dan banyak curah hujan 22 mm/th.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Wonobojo adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;

- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketetraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan Wonoboyo

a. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Perda Kabupaten Temanggung No.18/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kabupaten Temanggung yang selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati Temanggung No. 79 tahun 2008 tentang penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana susunan organisasi sbb:

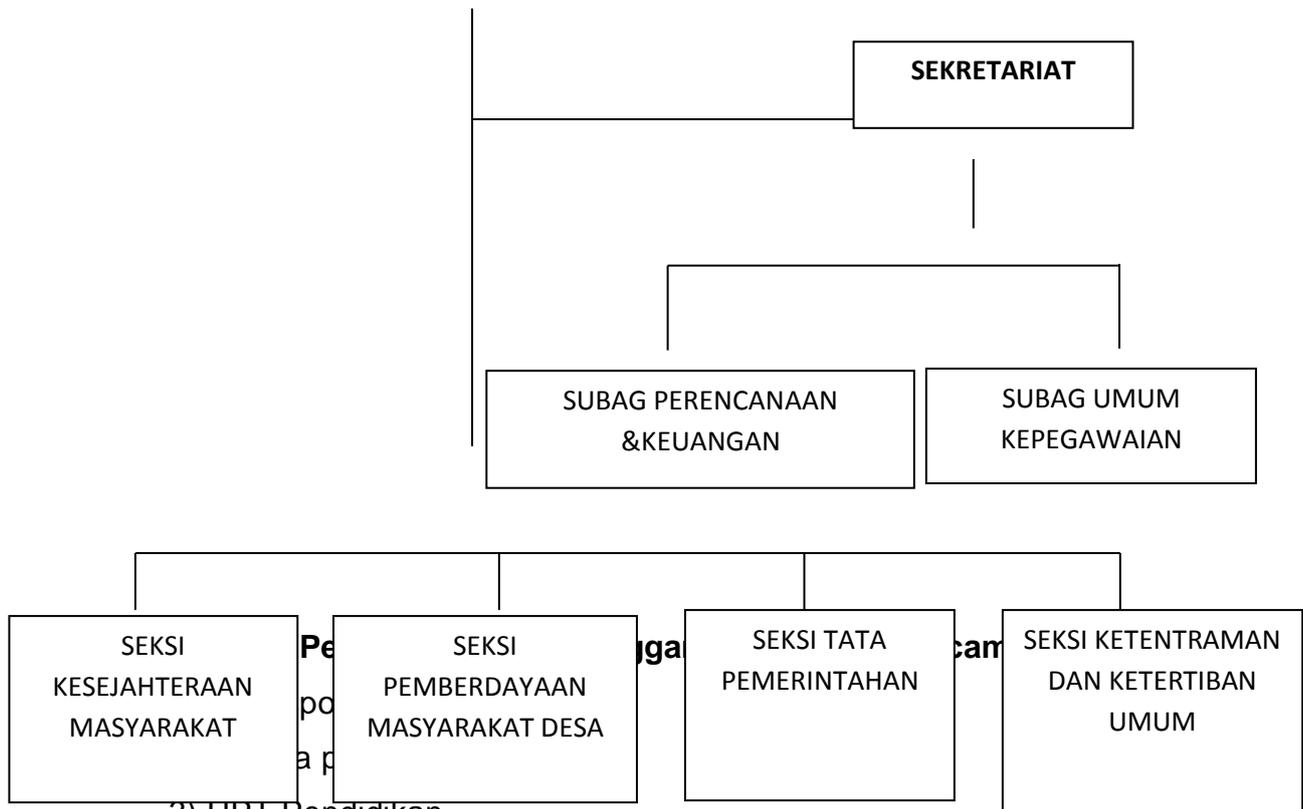
- 1) Camat
- 2) Sekretariat
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Adapun strukturnya sebagai berikut:

Gambar 1.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan





- 3) UPT Pendidikan
- 4) UPT Puskesmas
- 5) UPT Pertanian
- 6) UPT Disperindakop UMKM
- 7) UPT PU di Ngadirejo
- 8) KUA
- 9) PPAI
- 10) UPT KB
- 11) Statistik
- 12) Petugas Sosial Kecamatan
- 13) Petugas Bank Jateng
- 14) KEK

c. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia pegawai kantor kecamatan wonoboyo Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019 , dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	-	
	b. SMP	1	
	c. SMA	10	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	3	
	f. S-2	1	
Jumlah		16	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	9	
	c Gol III	4	
	d Gol IV	2	
Jumlah		16	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	4	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional Khusus	-	
	f Jabatan Fungsional Umum	10	
Jumlah		18	

Dari data table di atas rata-rata pegawai di Kantor Kecamatan Wonoboyo merupakan lulusan SMA sederajat dengan pangkat golongan II

4. Isu Strategis Kantor Kecamatan Wonoboyo

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wonoboyo permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
5. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
6. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
7. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
8. Masih adanya rumah tidak layak huni;
9. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
10. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu;
11. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu;

Tabel 2.

Identifikasi Permasalahan Kecamatan Wonoboyo

Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewena	

				ngan OPD)	
Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang ada di desa	belum optimalnya pemahaman tugas dan fungsi masing-masing lembaga /aparat	Masing-masing aparat memahami tugas fungsinya	Terbatasnya personil di Kecamatan	Masih terbatasnya kualitas SDM	Kurangnya penguatan kelembagaan,
Belum optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E Government)	Belum semua aparat memahami teknologi informasi	Masing – masing perangkat menguasai teknologi	Terbatasnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi	Masih rendahnya kualitas SDM	Kurangnya tenaga ahli
Belum optimalnya dukungan data / informasi statistik	Belum maksimalnya dukungan data dari desa	-Tersedianya data yang valid	-	Kurang memahami tugas dan fungsi masing-masing perangkat	Kurangnya penguatan kelembagaan

Kurangnya keakuratan dan validitas data base kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan	Belum akuratnya data data kependudukan	Data kependudukan yang akurat	-	Kualitas SDM masih rendah.	Kurangnya personil
--	--	-------------------------------	---	----------------------------	--------------------

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 2.

Data Pokok Kecamatan Wonobojo

Kabupaten Temanggung

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1.	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
2.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	V	V	V	V	V
3.	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	V	V	V	V	V

4.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
5.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
6.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	IP	V	V	V	V	V
7.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
8.	Angka kriminalitas kecamatan	IP	V	V	V	V	V
9.	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	V	V	V	V	V
10.	Persentase rumah tidak layak huni	IP	V	V	V	V	V
11.	Persentase rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	IP	V	V	V	V	V

12.	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	IP	V	V	V	V	V
13.	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	IP	V	V	V	V	V

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA LKJIP

Penulisan LkjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d 4 Th 2019)
2. IKPD Th 2019
3. Evaluasi Renja Tw 4 Th 2019
4. Prestasi Perangkat Daerah (tk Prov/nasional)
5. Rencana Aksi PD (contoh terlampir)

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

(diseragamkan dari ortala)

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

D. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (diseragamkan dr ortala)

1. VISI daerah
2. MISI daerah

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

- B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- D. Rencana Anggaran Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

- 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (melihat tujuan dan sasaran PD)
- 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

- 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
- 2. Analisis Efisiensi (membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan, contoh terlampir)

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2019

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	1.1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
		1.2	peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan
		1.3	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan
		1.4	peningkatan kesejahteraan masyarakat
		1.5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, maka Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tanggal..... Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonoboyo di Lingkungan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1.1	Persentase kegiatan yang selesai tepat wakt
2.	Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	2.1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan
		2.2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
		2.3	Persentase realisasi penerimaan PBB
3.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	3.1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
		3.2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
4.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	4.1	Persentase tempat ibadah kondisi baik
		4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5.	Peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	5.1	Persentase Angka kriminalitas kecamatan
		5.2	Persentase penanganan laporan kejadian

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2019. Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase kegiatan yang selesai tepat wakt	%	100
2.	peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100
3.	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100
4.	peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	100
5.	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase Angka kriminalitas kecamatan	%	100
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung NomorTahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 2.235.375.671 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.721.298.136 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 531.901.550. Adapun komposisi belanja langsung dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	390.999.435
2	Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	46.300.400
3	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	48.923.100
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	14.542.500
5	Peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	18.504.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke..... dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tanggal Agustus tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	Cukup
5	Capaian < 55,00%	Kurang

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wonobojo di lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
1.	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	96,7	96,7
2.	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100	96,7	100
	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0,85	85
	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100

3.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100
	APB-Desa tepat waktu Persentase jumlah desa yang menyelesaikan	%	100	100	100
4.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	97,10	100
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,57	15,85	100
5.	Persentase Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	4,3	100
	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	72	72

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

Misi 3(Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator:

1. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu, mencapai 100%
2. Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan, mencapai 96,67%
3. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, mencapai 85%
4. Persentase realisasi penerimaan PBB, mencapai 100%
5. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu mencapai 100%
6. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu mencapai 100%
7. Persentase tempat ibadah kondisi baik, mencapai 100%
8. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mencapai 100%
9. Persentase Angka kriminalitas kecamatan, mencapai 100%
10. Persentase penanganan laporan kejadian, mencapai 72%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar 94,51%

2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di lingkungan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung dapat membeikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor..... Tahun 2018 tanggal Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	4 Indiktor
2	Sangat Baik	2	6 Indiktor
3	Baik	-Indiktor
4	Cukup	-Indiktor

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikutt:

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1	96,70	Sangat Baik
2.	peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	3	95	Sangat Baik

3.	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	2	100	memuaskan
4.	peningkatan kesejahteraan masyarakat	2	100	memuaskan
5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	2	86	Sangat Baik
JUMLAH		10		

Secara umum Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Sasaran RPJMD		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas						
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1.1	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100

2.	peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	2.1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	95,84	100	100
		2.2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,85	100	100
		2.3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100
3	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	3.1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100
		3.2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100
4	peningkatan kesejahteraan masyarakat	4.1	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	98,55	100	100
		4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	15,42	100	100
5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	5.1	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	100	100
		5.2	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	40	40

Sasaran 2: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya tatakelola penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	

Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	97,39	100	96,67	96,67	100	39	39
Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0,79	1	0,85	100	1	0,32	0,32
Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	40	40

Sasaran 3: peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan, Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (tiga) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	86	100	100	100	100	37,2	37,2

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	86	100	100	100	100	37,2	37,2
--	---	----	-----	-----	-----	-----	------	------

Sasaran 4: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	75	98,55	100	100	40	40
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	100	10,57	14,93	100	100	40	40

Sasaran 5: Peningkatan Ketrentaman Dan Ketertiban Masyarakat Dan Desa Di Kecamatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Peningkatan Ketrentaman Dan Ketertiban Masyarakat Dan Desa Di Kecamatan, Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Ketrentaman Dan Ketertiban Masyarakat
Dan Desa Di Kecamatan

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Angka kriminalitas kecamatan	%	N.A	4,3	4,3	100	4,3	20	20
Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	72	100	40	40

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.11
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja langsung	1.789.704.869	1.721.298.136	68.406.733
2	Belanja Tidak langsung	531.901.550	514.077.535	17.824.015

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar 96,29% dengan anggaran terbagi di 2 (dua) urusan. Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dapat dipeinci sebagai berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati

No	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	%
				Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan		Progra, Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	2.136.200	2.136.200	100
	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	2.136.200	2.136.200	100
		Program pelayanan administrasi perkantoran	133.859.100	121.226.946	90,56
		Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19998000	11591645	42,04
		Kegiatan Belanja Peralatan Kebersihan	1.295.800	1.295.800	100

		dan Bahan Pembersih			
		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000	4.943.400	98,87
		Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.995.900	2.995.900	100
		Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	19.985.000	16.406.000	82,09
		Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17.910.000	17.870.000	99,78
		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	24.950.000	24.950.000	100
		Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	32.404.800	31.854.601	98,30

		Program peningkatan sarana prasarana aparatur	267.636.250	264.852.289	98,96
		Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100
		Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	9.841.700	9.841.700	100
		Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	205.037.100	203.051.600	99,03
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.286.750	12.286.750	100
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.937.100	24.152.639	96,85
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.378.400	2.378.400	100
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala	3.155.200	3.141.200	99,56

		peralatan gedung kantor			
peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan		Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	46.300.400	45.285.400	97,81
	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Kegiatan Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	15.437.100	14.447.100	93,59
	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	1.724.500	1.724.500	100
	Persentase realisasi penerimaan PBB	Kegiatan Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	29.138.800	29.113.800	99,91
peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	48.923.100	48.923.100	100

	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	30.650.500	30.650.500	100
		Kegiatan Fasilitas Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa	8.742.000	8.742.000	100
		Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	9.530.600	9.530.600	100
peningkatan kesejahteraan masyarakat		Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	14.542.500	13.149.600	90,42
	Persentase tempat ibadah kondisi baik	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	6.591.200	6.591.200	100

	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	3.698.400	3.698.400	100
		Kegiatan Pendampingan program barang bersubsidi	4.252.900	2.860.000	67,25
peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan		Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	18.504.000	18.504.000	100
	Persentase Angka kriminalitas kecamatan	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	1.886.900	1.886.900	100
	Persentase penanganan laporan kejadian	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan	3.417.100	3.417.100	100
		Forum Koordinasi Pimpinan di	13.200.000	13.200.000	100

		Kecamatan (Forkopimca)			
--	--	---------------------------	--	--	--

1. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Wonobojo Tahun 2019

No	Sasaran PD (rentra PD)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	96,50	100	3,50
2	Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	97,81	100	2,19
3	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	100	100	0
4	peningkatan kesejahteraan masyarakat	90,48	100	9,58
5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	100	100	0

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya Perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran Masih rendahnya kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan* 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas & kompetensi SDM Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Belum optimalnya integrasi sistem e-planning dan e-budgeting*
2	Masih rendahnya penerapan hasil kelibangan*	Masih rendahnya sinergi antara hasil kelibangan dengan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan

SASARAN DAERAH (RPJMD) MISI 3	TUJUAN (Mengacu dari sasaran daerah)	INDIKATOR TUJUAN (Indikator sasaran daerah)	SASARAN (linier dgn MASALAH)	INDIKATOR SASARAN	ARAH KEBIJAKAN (linier dgn AKAR MASALAH)	STRATEGI
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelibangan yang berkualitas	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan Pelatihan SDM Meningkatkan Manajemen SDM Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
					Peningkatan Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan integrasi dan fungsi sistem e-planning dan e-budgeting
					Peningkatan integrasi integrasi sistem e-planning dan e-budgeting	
			Meningkatnya implementasi hasil kelibangan	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	
					Dst..	

BAB III

BAB IV

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN KESEKRETARIATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR	PROGRAM
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat		-	-	60	65	70	75	80	80	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat		-	-	60	65	70	75	80	80	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur • Program Peningkatan disiplin aparatur
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD		-	-	B	B	B	BB	BB	BB	Program perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN ##**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : CAMAT ##
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AL KHADZIQ
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, Januari 2020

Pihak Kedua
Bupati Temanggung

Pihak Pertama
Camat Wonobojo

HM. AL KHADZIQ

BUDI SUPRIYONO.SH.MM

Pembina
NIP. 196306051986091002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KECAMATAN ##

KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	SESUAI TARGET RENSTRA PD THN 2020
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	
		Persentase penanganan laporan kejadian	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan	..	APBD
2.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	..	APBD
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	..	APBD
4.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	..	APBD
5.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	..	APBD
6.	Program pelayanan administrasi perkantoran	..	APBD
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	..	APBD
8.	Program peningkatan Disiplin Aparatur	..	APBD
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan (khusus kecamatan yg memiliki kelurahan)	..	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan <i>(khusus kecamatan yg memiliki kelurahan)</i>	..	APBD

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 2020
Pihak Pertama,
CAMAT ##

M. AL KHADZIQ

.....
Pembina.....
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN ##**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : CAMAT ##
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, Januari 2020

Pihak Pertama,
CAMAT ##

Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN...

.....
Pembina.....
NIP.

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN ##
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR PROGRAM DALAM RPJMD)	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	100%
		Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	
		Persentase tempat ibadah kondisi baik	
		Persentase RTLH	
		Angka kriminalitas kecamatan	
		Persentase penanganan laporan kejadian	
	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak (khusus kecamatan yg memiliki kelurahan)		

		Persenatse lembaga masyarakat kelurahan yang aktif (khusus kecamatan yg memiliki kelurahan)	
--	--	---	--

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan	..	APBD
2.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	..	APBD
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	..	APBD
4.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	..	APBD
5.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	..	APBD
6.	Program pelayanan administrasi perkantoran	..	APBD
7.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	..	APBD
8.	Program peningkatan Disiplin Aparatur	..	APBD
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan (khusus kecamatan yg memiliki kelurahan)	..	APBD
10.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan (khusus kecamatan yg memiliki kelurahan)	..	APBD

Temanggung, Januari 2020

Pihak Kedua,
CAMAT

Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN

.....
Pembina.....
NIP.

.....
.....
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN ##**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : CAMAT ##
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 9 September 2019

Pihak Kedua,
CAMAT ##

Pihak Pertama,
KASI TATA PEMERINTAHAN

.....
Pembina.....
NIP.

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**KECAMATAN ##****KABUPATEN TEMANGGUNG****KASI TATA PEMERINTAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan permohonan perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi public tingkat kecamatan; Penyusunan LPPD dan LKPPD; penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan pertanahan.	..
		Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, terpenuhinya target pendapatan daerah	..
		Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD dan PAW BPD	..

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan		APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
2.	Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan		APBD
3.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD		APBD

Temanggung, 2020

Pihak Kedua,
CAMAT ##

Pihak Pertama,
KASI TATA PEMERINTAHAN

.....
Pembina
NIP.

.....
.....
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN ##**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : LURAH ##
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : CAMAT ##
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2020

Pihak Pertama,
CAMAT ##

Pihak Pertama,
LURAH ##

.....
Pembina.....
NIP.

.....
.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**KECAMATAN ##****KABUPATEN TEMANGGUNG****LURAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana lokal kelurahan	
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana	
		terlaksananya Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	
		Pembangunan penampungan air bersih RW.002 Brojolan Timur	
		Pembangunan drainase Rw.005 Lingkungan Batan dan Rw 008 Lingkungan Puntuksari	
		Pengaspalan jalan lingkungan RW.001, Betonisasi RW. 003, Pengaspalan jalan lingkungan RW.006, Betonisasi RW.008	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*)	..	APBD
2.	Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan	..	APBD
3.	dst	..	APBD
4.		..	APBD
5.		..	APBD
6.		..	APBD
7.		..	APBD
8.		..	APBD
9.		..	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
10.		..	APBD

Temanggung, 2020

Pihak Kedua,
CAMAT

Pihak Pertama,
LURAH

.....
 Pembina.....
 NIP.

.....

 NIP.

**PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : TEMANGGUNG
PERANGKAT DAERAH : KANTOR KECAMATAN WONOBOYO
URUSAN YG DILAKSANAKAN
1 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2 URUSAN PENDUKUNG KEPALA DAERAH

No	ASPEK	FOKUS	NO IKK	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program peningkatan pengelolaam tata Pemerintahan di kecamatan Anggaran Rp. 46.300.400- Realisasi Rp. 45.285.400,- 2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan desa di Kecamatan Anggaran Rp. 48.923.100,- Realisasi Rp. 48.923.100,- 3. program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kecamatan Anggaran Rp. 14.542.500,- Realisasi Rp. 13.149.600,- 4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Kecamatan Anggaran Rp. 18.504.000,- Realisasi Rp. 18.504.000,-	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah Anggaran Rp. 2.136.200,- Realisasi Rp. 2.136.200,- 2. Program pelayanan Administrasi perkantoran Anggaran Rp 133.859.100,- Realisasi Rp. 121.226.946,- 3. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Anggaran Rp.267.636.250,- Realisasi Rp. 264.852.289,-	4 Program	3Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP ttg Input KTP dan KK 2. SOP ttg Surat Pindah 3. SOP ttg Rapat Koordinasi Desa 4. SOP ttg Kegiatan Keagamaan 5. SOP ttg Pelatihan Kebencanaan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengadaan Barang 2. SOP ttg Penomoran Surat 3. SOP ttg Penyusunan DUK 4. SOP ttg Penyusunan RKA 5. SOP ttg Pembuatan SPJ	5 SOP	5 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	tidak ada	Apabila ada sebutkan	Apabila ada sebutkan	tidak ada	tidak ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 5	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 3	60%	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0	tidak ada	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS	- PNS Perangkat daerah, sebanyak <u>10</u> personel - Total PNS Kabupaten sebanyak <u>6670</u> personel	- PNS Perangkat daerah, sebanyak <u>6</u> personel - Total PNS Kabupaten sebanyak <u>6670</u> personel	0.19%	0.09%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sebanyak 1 - Pejabat yang ada sebanyak 3	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sebanyak 1 org - Pejabat yang ada sebanyak 3	25%	0.00%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 3	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 3	0%	0%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPDP	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah di perangkat daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Ada a dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra PD 2. Renja PD 3. RKA PD	Ada dokumen yang dimaksud, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 dokumen	3 dokumen	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
			10	Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 4 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 4 program	- Jumlah program RKPDP yang diakomodir dalam Renja perangkat daerah sebanyak 3 program - Jumlah program dalam Renja yang ditetapkan sebanyak 3 program	100%	100%	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100.00%	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 4 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah , sebanyak 3 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100%	100%	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.273.974.869,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.946.665.378.918-	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 403.631.550,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.946.665.378.918-	100%	100%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.230.692.636,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.835.329.773.913-	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 388.215.435 , - - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.1.835.329.773.913,-	100%	100%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 125.862.100,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.618.908.071,-	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 388.215.435,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.618.908.071,-	100%	100%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.104.830.536,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.618.908.071,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. , - - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.618.908.071,-	100%	100%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)		Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 17 jenis, sbb: 1. LRA Belanja 2. Laporan Operasional (LO) 3. Neraca 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. CALK 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab 7. Rekap Realisasi SP2D dan SPJ 8. Daftar Pungut dan Setor Pajak 9. STS Sisa Kas (UYHD) 10. Laporan Jasa Giro Tahun 2019 11. Daftar Sisa Persediaan 12. Daftar Berita acara Stock Opname 13. Laporan daftar Retensi yang sudah dicairkan di tahun 2019 14. Laporan daftar Retensi yang akan dicairkan di tahun 2020 15. Laporan Belanja Hibah/Bantuan 16. FC Ebilling 2019 yang dibayar di 2020 17. LRA Pendapatan		Ada sebanyak 17 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada, jenis dokumennya: 1. KIB A 2. KIB B 3. KIB C 4. KIB.D 5.KIB.E 6.KIB F	Ada, jenis dokumennya: 1. KIB A 2. KIB B 3. KIB C 4. KIB.D 5.KIB.E 6.KIB F	Ada/ tidak ada (ditulis ada)	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %		- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.1.058.300,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 2.020.463.773,-	0,05%	0,05%	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatk
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi		Sebutkan jenisnya 1. papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan	Jumlah sebanyak ----- jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	KK KTP	(Tidak ada)	78,88 % 79,33 %	— tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.

Camat Wonobojo

BUDI SUPRIYONO, SH, MM

NIP. 19630605 198609 1 002

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

No	ASPEK	FOKUS	NO I K K	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	Urusan Administrasi Pemerintahan	Urusan Pendukung Kepala Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

**EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 - S/D TRIWULAN IV
KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.																			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27		16																		
A PENDUKUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																																														
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di			100	637,378,000			36	55,500,000	52,250,800	3	1,724,500	10	5,044,800	96.7	96.7	0	5,808,800	96.7	45,245,400	86.59	96.7	45,245,400	96.67	96.7	0	96.67	6.53																		
	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100		0		100				96.7		96.7		96.7				96.7				96.67		96.7																					
	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1		0		1				0.85		0.85		0.85				0.85		100		0.9			91.50																				
	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100		0		100				0		23.11						23.11		23.11		23.1			23.11																				
a	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	bulan	60	168,500,000	0	0	12	22,500,000	21,387,500	3	1,724,500	3	5,044,800	3	3,553,500	3	5,808,800	12	14,407,100	100	67.36	12	14,407,100	20	8.55																				
b	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa ,Perangkat Desa dan BPD	Terisinya Kekosongan Kades,Perdes dan BPD	bulan	60	40,803,000	0	0	12	3,000,000	1,724,500	3	1,724,500	3	0	3	0	3	0	12	1,724,500	100	100.00	12	1,724,500	20	4.23																				
c	Koordinasi pengembangan potensi desa/ kelurahan	Terpenuhinya target pendapatan daerah	bulan	60	428,075,000	0	0	12	30,000,000	29,138,800	0	0	0	0	3	1,144,900	9	27,968,891	12	29,113,800	100	99.91	12	29,113,800	20	6.80																				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B.4																				100																										
Predikat																																														
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																																													
1	Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			180	583,144,000	0	0		68,500,000	56,472,700		13,745,100		8,515,000		9	11,875,000		9	14,788,000				48,923,100		0	8	0																		
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	100				100					100			100				100				100		100																					
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	100				100					100			100				100				100		100																					
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	bulan	60	380,000,000	0	0	12	40,500,000	30,650,500	100	11,709,500	3	2,703,200	3	6,694,700	3	9,543,100	12	30,650,500	100	100	12	30,650,500	20	8																				
b	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Desa	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada Desa	bulan	60	100,000,000	0	0	12	15,000,000	16,291,600	100	170,000	3	2,501,800	3	3,015,000	3	3,055,200	12	8,742,000	100	54	12	8,742,000	20	8.74																				
c	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Meningkatnya kualitas SDM pengurus PKK Desa/Kelurahan	bulan	60	103,144,000	0	0	12	13,000,000	9,530,600	3	1,865,600	3	3,310,000	3	2,165,300	3	2,189,700	12	9,530,600	100	100	12	9,530,600	20	9																				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B.6																				100																										
Predikat																																														
3	BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																																													
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan			180	245,324,000	0	0		22,000,000	14,542,500		445,000		2,744,900			4,404,000		6,948,600				14,542,500		100.00	100	14,542,500	55.56	13																	
	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75				75				97.10		97.10		97.10				97.10		100																									

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.																					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27		16																				
		Persentase RTLH	%	5				10.57				15.85		15.85		15.85		15.85		15.85		66.69		15.85		31.55																						
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat	bulan	60	163,500,000	0	0	12	10,500,000	6,591,200	3	85,000	3	740,000	3	2,239,000	3	3,527,200	12	6,591,200	100	100	12	6,591,200	20																							
b	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terkoordinasinya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan	bulan	60	48,128,000	0	0	12	6,500,000	3,698,400	3	275,000	3	1,914,900	3	350,000	3	1,158,500	12	3,698,400	100	100	12	3,698,400	20																							
c	Pendampingan Program Barang Bersubsidi	Terlaksananya program barang bersubsidi dengan lancar	bulan	60	33,696,000	0	0	12	5,000,000	4,252,900	3	85,000	3	90,000	3	1,815,000	3	2,262,900	12	4,252,900	100	100	12	4,252,900	20	13																						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B.5																					100																											
Predikat																																																
4	BIDANG TRANTIB																																															
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam			144	168,587,000	0	0		22,700,000	18,504,000		4,065,000	37	6,849,000		3,300,000		4,290,000		18,504,000		100	100	100	18,504,000	69.44	14																					
		Angka kriminalitas kecamatan	%	4.3				4.3			0		0		0		0		0		100		0		100																							
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100				100			72		72		72		72		72		72		72																									
a	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	bulan	60	74,000,000	0	0	12	4,000,000	1,886,900	3	0	3	896,900	3	0	3	990,000	12	1,886,900	100	100	12	1,886,900	20	3																						
b	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/pilpresdan pileg di tingkat kecamatan	Bulan	24	14,000,000	0	0	12	5,500,000	3,417,100	3	765,000	3	2,652,100	3	0	3	0	12	3,417,100	100	100	12	3,417,100	50	24.41																						
c	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	bulan	60	80,587,000	0	0	12	13,200,000	13,200,000	3	3,300,000	3	3,300,000	3	3,300,000	3	3,300,000	12	13,200,000	100	100	12	13,200,000	20	16																						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B.7																					100																											
Predikat																																																
A	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																																															
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitmbangan perangkat daerah				28,000,000	0	0		5,000,000	2,136,200	10	1,323,900	8	0	8	327,500	8	484,800	34	2,136,200	100	100	34	2,136,200	20.36	7.63																						
a	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, PK,LKjJP,LPPD,RFK dan Evaluasi Renja	dokumen	167	28,000,000	0	0	34	5,000,000	2,136,200	10	1,323,900	8	0	8	327,500	8	484,800	34	2,136,200	100	100	34	2,136,200	20.36	7.63																						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1																					100																											
Predikat																																																
B	PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD																																															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			600	885,932,000	-	-		130,500,000	133,859,100		19,890,072		38,462,791		30,444,309		32,469,778		121,266,950		90.59	91	121,266,950	15.10	13																						
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Terbayernya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	bulan	60	93,897,000	0	0	12	20,000,000	19,998,000	3	2,658,323	3	3,112,895	3	1,867,759	3	3,952,672	12	11,591,649	100	57.96	58	11,591,649	96.61	12																						
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	bulan	60	28,205,000	0	0	12	3,000,000	1,295,800	3	677,300	3	0	3	368,700	3	249,800	12	1,295,800	100	100	12	1,295,800	20	5																						

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.			
				Target 2019				Realisasi per Triwulan Th. 2019				Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
J U M L A H				3,195,862,000	0	0	36	367,200,000	545,401,550	13	65,360,272	58	69,744,130	17	68,042,559	17	279,656,178	133	515,470,439					515,470,439			
Rata rata capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah																		100	94.51								
Predikat TT																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan																		Rata rata capaian kinerja Program		84.27							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai																		Predikat		79.53							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA																											

Disusun :
 Temanggung, 06 Januari 2020
 CAMAT WONOBOYO

JANURI,S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197803171997031002

Dievaluasi :
 Temanggung, 06 Januari 2020
 KABUPATEN TEMANGGUNG

RIPTO,SUSILO,SH, Msi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670427 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN WONOBOYO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Dasar	Meningkatnya Aksebilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa	
		Terlaksananya lomba antar sekolah SD/MI se Kecamatan	1 kegiatan
2.	Meningkatnya lingkungan sehat	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar	
		Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dilingkungan	1 SD/MI
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan , pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tepat waktu	27 dokumen
4.	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	
		Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan	13 desa
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat	
		Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	13 desa
6.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, layanan bimbingan rokhani, penegakan hukum dan layanan bantuan hukum	
		Meningkatnya keluarga sejahtera	13 desa
7.	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana	Persentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam waktu 1 (satu) tahun	
		Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan pencegahannya	13 desa
8.	Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	Cakupan Fasilitasi Tri Kerukunan Umat Beragama dan Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan	
		Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan	

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur	Persentase Pengisian BPD antar waktu yang Kosong	13 desa
		Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa	13 desa
		Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan	13 desa
		Terisinya kekosongan Anggota BPD	13 desa
10	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	
		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa	13 desa
		Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan	13 desa
		Terseleenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan	1 tahun
11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	
		Terpenuhinya target pendapatan daerah	13 desa
		Persentase Anggaran Penata usahaan OPD terhadap Total Belanja Langsung OPD	
		Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik	12 bulan
		Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan	12 bulan
		Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan
		Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan
		Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai.	12 bulan
		Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	12 bulan
		Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	12 bulan
		Persentase Anggaran Penata usahaan OPD terhadap Total Belanja Langsung OPD	
		Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan kantor	2 unit
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 unit
		Tersedianya peralatan gedung kantor (komputer dan printer)	2 unit
		Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	12 bulan
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	12 bulan
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan

(1)	(2)	(3)	(4)
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan
		Persentase Anggaran Penata usahaan OPD terhadap Total Belanja Langsung OPD	
		Terciptanya disiplin aparatur	20 potong
12	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya cadangan pangan masyarakat	
		Lancarnya penyaluran raskin	13 desa
13	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna, Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran	13 desa
		Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan	13 desa
		Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	1 desa
		Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase	
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	13 desa
		Telaksananya Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan	13 desa
14	Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah	Besaran ketersediaan data statistik	
		Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	13 Desa
15	Meningkatnya pengelolaan Keuangan di daerah.	Terfasilitasnya dan terbinanya penyusunan pelaksanaan kegiatan di desa.	
		Terfasilitasnya penyusunan peraturan desa tentang APBDes	13 Desa
		Terfasilitasnya penyaluran dana operasional dan dana pembangunan desa.	13 Desa

Rincian Anggaran Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan	Rp 46,300,400.00	Sumber dana APBD
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Rp 48,923,100.00	Sumber dana APBD
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Rp 14,542,500.00	Sumber dana APBD
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Rp 18,504,000.00	Sumber dana APBD
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Rp 2,136,200.00	Sumber dana APBD
6	Program pelayanan adminisitrasi perkantoran	Rp 133,859,100.00	Sumber dana APBD
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Rp 267,636,250.00	Sumber dana APBD
Jumlah semua		Rp 531,901,550.00	

BUPATI TEMANGGUNG

HM.AL KHADZIQ

Temanggung, Februari 2019
CAMAT WONOBOYO

JANURI,S.STP

Pembina
NIP. 198703171997031002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO

Jl. Candiroto-Wonobojo No. 18 A Telp. 08112632621 Kode Pos 56266
WONOBOYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JANURI,S.STP**
Jabatan : Camat Wonobojo
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HM. AL KHADZIQ**
Jabatan : Bupati Temanggung

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2019

Pihak Kedua
Bupati Temanggung

Pihak Pertama
Camat Wonobojo

HM. AL KHADZIQ

JANURI,S.STP
Pembina
NIP. 197803171997031003



EMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO

Jl. Candiroto-Wonobojo No. 18 A Telp. 08112632621 Kode Pos 56266
WONOBOYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : KRISTI JUWONO

J a b a t a n : KASI TAPEM

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : JANURI,S.STP

J a b a t a n : CAMAT WONOBOYO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT WONOBOYO

Temanggung, Februari 2019
Pihak Pertama,
KASI TAPEM

JANURI,S.STP
Pembina
NIP. 197803171997031002

KRISTI JUWONO
NIP.1969041919901001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO

Jl. Candiroto-Wonobojo No. 18 A Telp. 08112632621 Kode Pos 56266
WONOBOYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SUPARDI
J a b a t a n : KASI TRANTIBUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : JANURI,S.STP
J a b a t a n : CAMAT WONOBOYO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT WONOBOYO

Temanggung, Februari 2019
Pihak Pertama,
KASI TRANTIBUM

JANURI,S.STP
Pembina
NIP. 197803171997031002

SUPARDI
NIP.196110091986031010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO

Jl. Candiroto-Wonobojo No. 18 A Telp. 08112632621 Kode Pos 56266
WONOBOYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SUTARYO
J a b a t a n : KASI KESMAS
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : JANURI,S.STP
J a b a t a n : CAMAT WONOBOYO
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT WONOBOYO

Temanggung, Februari 2019
Pihak Pertama,
KASI KESMAS

JANURI,S.STP
Pembina
NIP. 197803171997031002

SUTARYO
NIP.196307251983041004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO

Jl. Candiroto-Wonobooyo No. 18 A Telp. 08112632621 Kode Pos 56266
WONOBOYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : PURWAJI .BA

J a b a t a n : KASI PMD

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : JANURI,S.STP

J a b a t a n : CAMAT WONOBOYO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT WONOBOYO

Temanggung, Februari 2019
Pihak Pertama,
PMD

JANURI,S.STP
Pembina
NIP. 197803171997031002

PURWAJI.BA
NIP.196110121990031010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO

Jl. Candiroto-Wonobooyo No. 18 A Telp. 08112632621 Kode Pos 56266
WONOBOYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : BUDI SUPRIYONO.SH.MM

J a b a t a n : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : JANURI,S.STP

J a b a t a n : CAMAT WONOBOYO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
CAMAT WONOBOYO

Temanggung, Februari 2019
Pihak Pertama,
SEKCAM

JANURI,S.STP
Pembina
NIP. 197803171997031002

BUDI SUPRIYONO.SH.MM
Pembina
NIP.196306051986091002

